
 <p><b>SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</b></p>	Nomor SOP	008/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-PPK/06/2022
	Tgl. Ditetapkan	19/03/2018
	Tgl. Revisi	23/06/2022
	Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
	Ditetapkan Oleh	<p>DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p><u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>
<b>BIMSUHTAR</b>		
<b>ISO 9001:2015</b>		
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Cara Mengatasi :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kelautan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</li> <li>6. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 100 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</li> <li>7. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan;</li> <li>8. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut;</li> <li>9. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</li> <li>10. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>11. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. KM 43 tahun 2008 tentang pendidikan dan pelatihan, dan ujian keahlian, serta sertifikat kelautan;</li> <li>12. Peraturan Menteri perhubungan RI No. KM 52 tahun 2007 tentang pendidikan dan pelatihan transportasi;</li> <li>13. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</li> <li>14. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.11/ BPSDMP-2014 Tentang Pola Pengasuhan Taruna/i Diklat Pembentukan pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;</li> <li>15. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan No. SK. 2163/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Keahlian Pelaut Tingkat III non Diploma (Crash Program/ Fast Track);</li> <li>16. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan No. SK. 2162/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan;</li> </ol>	<p>Dilakukan kegiatan BIMSUHTAR sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 20px auto;"> <p><b>DOKUMEN INDUK</b></p> </div>	

<p>17. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan nomor SK.827/HM.208/VII/Diklat-07 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Disiplin Peserta Diklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;</p> <p>18. STCW No. 1978 dan Amandemennya;</p> <p>19. ISO 9001:2015, Klausul 7.5.3. Pengendalian Informasi Terdokumentasi, Klausul 8.5. Pengendalian Produksi dan Jasa.</p>	
<p><b>Keterkaitan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Mutu Poltekpel Sumbar;</li> <li>2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi.</li> </ol>	<p><b>Peralatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer;</li> <li>2. Printer;</li> <li>3. Lembar Kerja.</li> </ol>
<p><b>Peringatan :</b></p> <p>Apabila SOP BIMSUHTAR tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	

**SOP BIMSUHTAR**

NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.	
		KA. PPK	PADIS	PETUGAS POLIKLINIK	PENYUSUN KEGIATAN TIM DINAS JAGA	TIM DINAS JAGA	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	1. Mendapatkan surat tugas dan jadwal dinas jaga oleh Tim Jaga. 2. Melakukan koordinasi antar tim untuk mengatur jadwal penggantian selanjutnya diinformasikan kepala PPK 3. Mengambil buku harian/ jurnal di PPK, mengisi daftar hadir dan mencatat standing order di PPK oleh tim jaga 4. Memeriksa kebersihan dormitori, memastikan kelengkapan taruna dan memeriksa kondisi kesehatan dan keselamatan taruna. 5. Melaksanakan tugas di Dormitori dengan pedoman PHST dan mengisi buku harian/ jurnal.						1. Surat Tugas 2. Form penggantian jaga 3. Buku harian/ jurnal 4. Cheklist Pemeriksaan 5. Buku harian/ jurnal	-	1. Surat Tugas 2. Form penggantian jaga 3. Buku harian/ jurnal 4. Laporan pemeriksaan 5. Buku harian/ jurnal terisi	Petugas Dinas Jaga mulai melaksanakan tugas jam 18.00
2	Melakukan koordinasi segera dengan Petugas Poliklinik jika ada taruna sakit.						Alat Komunikasi dan Kendaraan	-	Hasil Pemeriksaan	Jika tidak bisa ditangani segera dibawa ke rumah sakit.
3	Menerima laporan dari tim Dinas Jaga bila ada masalah darurat lain yang berhubungan dengan taruna.						Alat Komunikasi	-	Hasil Pemeriksaan	-
4	1. Petugas Tim Dinas Jaga mengisi buku berpedoman dengan PHST. 2. Mengembalikan buku jurnal ke Pusat Pengembangan Karakter						1. Buku berpedoman dengan PHST 2. Buku Jurnal	-	1. Buku berpedoman dengan PHST terisi 2. Buku Jurnal terisi	Tugas Tim Dinas Jaga selesai jam 06.00

<b>RIWAYAT PERUBAHAN SOP BIMSUHTAR</b>		
<b>NO.</b>	<b>ISI PERUBAHAN</b>	<b>TANGGAL BERLAKU</b>
01	Perubahan format SOP sesuai PM.No.50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan	04/07/2019
02	Penambahan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020
03	- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	23/06/2022
	Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	
	Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	